



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2023

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH  
KOTA YOGYAKARTA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos : 55165,  
No Telp (0274) 540625, 515865, 562682  
Email : [perinkopukm@jogjakota.go.id](mailto:perinkopukm@jogjakota.go.id)  
<https://perinkopukm.jogjakota.go.id>



# Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Kepala Dinas

Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH., M.Si.  
NIP 196701191992031005

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1, kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat, memiliki dua indikator kinerja yakni Omset Koperasi dan Omset UKM Usaha Mikro. Indikator omset koperasi tingkat capaian kinerjanya sebesar 107,80%. Sedangkan indikator Omset UKM Usaha Mikro tingkat capaian kinerjanya sebesar 110,78 %.
- b. Sasaran 2, kinerja sektor industri meningkat memiliki dua indikator kinerja yakni Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM. Tingkat capaian kinerja pada indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM sebesar 110 %. Sedangkan indikator kinerja Nilai Investasi IKM membukukan tingkat capaian kinerja sebesar 187 %.
- c. Sasaran 3, reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki satu indikator yakni Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu dan menjadi perhatian bagi Bappeda Kota Yogyakarta ke depan antara lain:

1. Meningkatkan pengembangan koperasi dan UMKM melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kualitas produk, kapasitas usaha dan perluasan kemitraan.
2. Meningkatkan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus, penyuluhan dan pendampingan koperasi.
3. Meningkatkan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan kewirusahaan dan digitalisasi UMKM

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Isu-Isu Strategis .....	3
1.4 Keadaan Pegawai.....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
1.6 Keuangan.....	9
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	13
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	20
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	21
2.3.1 Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.....	22
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	24
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	37
3.2.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.....	37
3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .	39
3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas .....	40
3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	43
3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	44
3.2.6 Analisis Efisiensi.....	45
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
3.2.8 Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender .....	46
3.2.9 Inovasi .....	48
3.2.10 Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.....	48
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

# Daftar Tabel

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jabatan Tahun 2023 .....	4
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta .....	9
Tabel 1.6 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta TA 2023.....	10
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026.....	14
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.....	15
Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta APBD Murni dan Perubahan Tahun 2023.....	22
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 .....	25
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	26
Tabel 3.4 Metadata Indikator Program Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023-2026.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	38
Tabel 3.6 Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Akhir.....	39
Tabel 3.7 Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dengan Indikator Kinerja Nasional, DIY dan Kabupaten Kulon Progo .....	41
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	44
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Tahun 2023.....	45
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi.....	47
Tabel 3.11 Implementasi Kebijakan/Program/Kegiatan Tentang Bantuan Usaha dan / atau Membangun Hubungan Kemitraan Bagi Perempuan Kepala Keluarga untuk Berwirausaha .....	48
Tabel 3.12 Inventarisasi Peran Lintas Sektor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2023 .....	49
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja di Luar Gaji dan Tunjangan AN 2023 .....	50
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	53
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2023.....	53

# Daftar Gambar

---

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta .....	2
Gambar 1.2 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.....	5
Gambar 1.3 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Golongan.....	6
Gambar 1.4 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Gambar 1.5 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	8

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKjIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat:

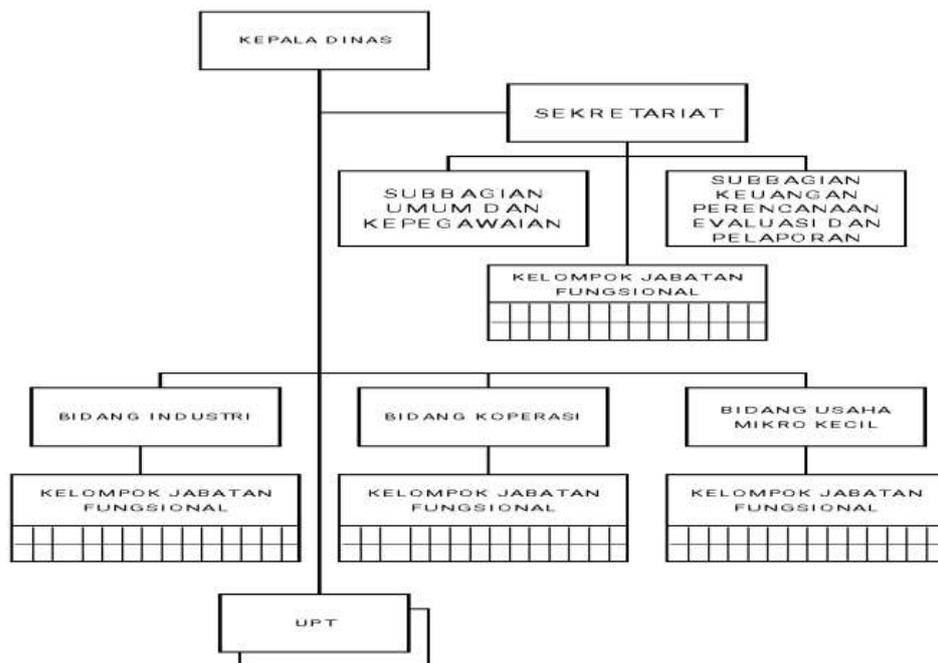
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



Sumber: Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

**Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta**

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 menetapkan bahwa Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;

2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan industri;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan koperasi;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha mikro kecil;
7. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
8. pengoordinasian fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
12. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
13. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
15. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

- a. Proporsi usaha mikro jauh lebih besar dibanding dengan jumlah usaha kecil dan menengah;
- b. Kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM/IKM masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja usaha;
- c. Akses pemodal bagi Koperasi dan UKM/IKM masih rendah. Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik dari tahun ke tahun yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan usaha Koperasi dan UKM/IKM.

- d. Daya saing Usaha Koperasi maupun UKM/IKM masih rendah; Permasalahan daya saing menjadi semakin berat mengingat gempuran barang impor dengan harga murah semakin gencar.
- e. Lemahnya inovasi dan motivasi Koperasi dan UKM untuk menjawab tantangan zaman.

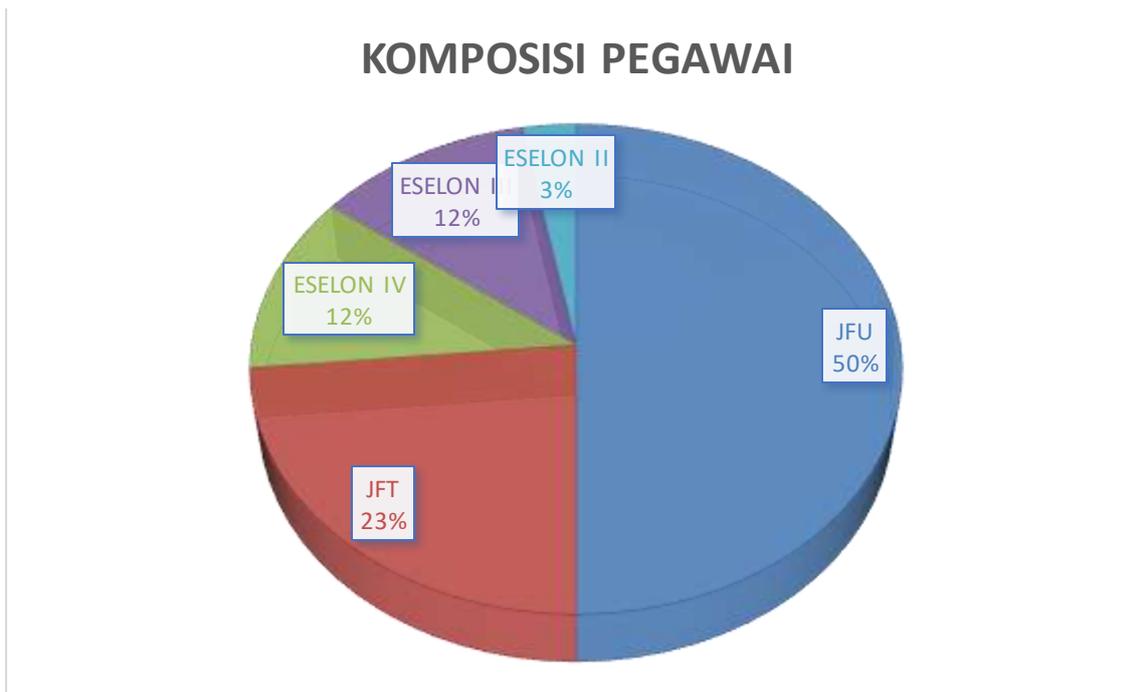
#### 1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, terbagi atas 33 orang PNS dan 1 orang PPPK. Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan jabatan struktural, JFU dan JFT ditunjukkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta adalah JFU sebanyak 17 orang (50%), Eselon IV sebanyak 4 orang (12%), JFT sebanyak 8 orang (23%), dan Eselon III sebanyak 4 orang (12%), dan Eselon II sebanyak 1 orang (3%).

**Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jabatan Tahun 2023**

Uraian	JFU	JFT	Eselon			Jumlah
			II	III	IV	
Sekretariat	7	-	1	1	2	11
Bidang Koperasi	2	2	-	1	-	5
Bidang Usaha Mikro	2	2	-	1	-	5
Bidang Industri	1	4	-	1	-	6
UPT Logam	5	0	-	-	2	7
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>34</b>

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2023



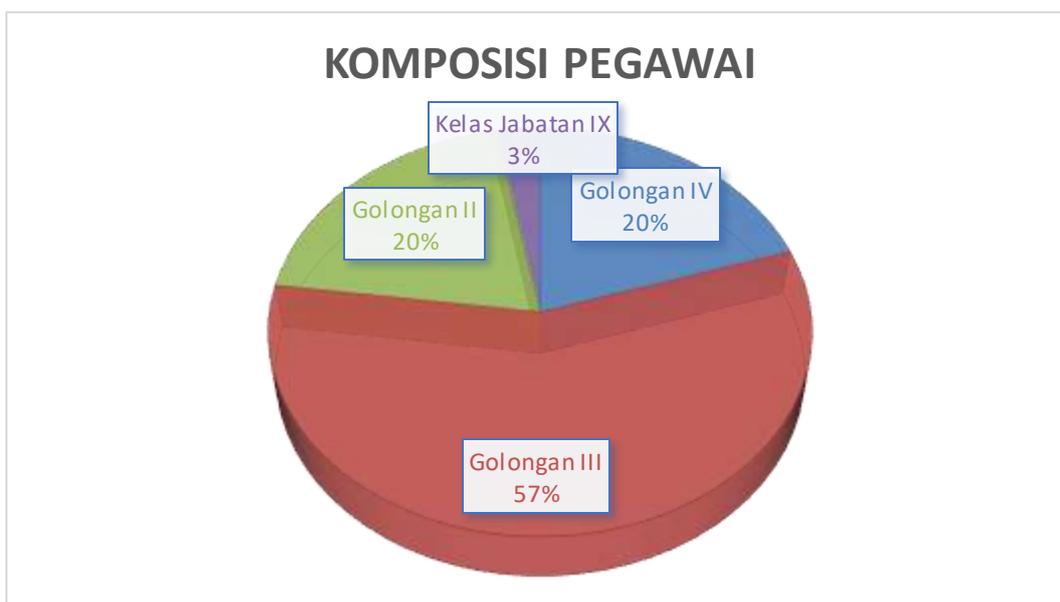
**Gambar 1.2 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Jabatan**

Tabel 1.2 dan Gambar 1.3 menunjukkan komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan golongan. Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta terdiri dari PNS dan PPPK. Sebagian besar PNS bergolongan III, yaitu sebanyak 20 orang (57%), diikuti golongan II sebanyak 7 orang (20%) dan paling sedikit golongan IV sebanyak 7 orang (20%). Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta menerima penempatan 1 orang PPPK yakni Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.

**Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan**

Uraian	PNS Golongan				PPPK	Jumlah
	I	II	III	IV		
Sekretariat	-	4	4	3	-	<b>11</b>
Bidang Koperasi	-	-	5	2	-	<b>7</b>
Bidang Usaha Mikro	-	1	3	1	-	<b>5</b>
Bidang Industri	-	-	4	1	<b>1</b>	<b>5</b>
UPT Logam	-	2	5	-	-	<b>7</b>
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2023



**Gambar 1.1 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Golongan**

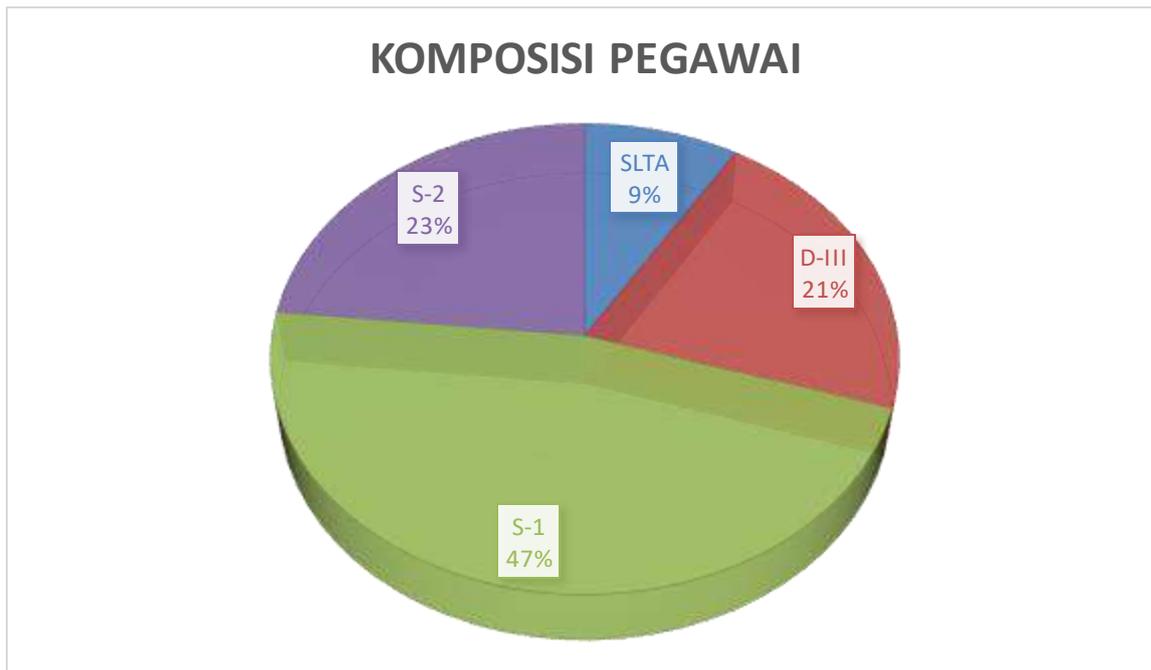
Berdasarkan jenjang pendidikannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3 dan Gambar 1.4, hampir separuh pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah lulusan sarjana (S1), yaitu 16 orang (47%), diikuti lulusan pasca sarjana (S2) sebanyak 8 orang (23%) dan D-III masing-masing 7 orang (21%), dan SLTA sebanyak 3 orang (9%). Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan tugasnya.

**Tabel 1.3**

**Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Uraian	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SLTP	SLTA	D-3	S1	S2	
Sekretariat	-	1	4	3	3	<b>11</b>
Bidang Koperasi	-	1	1	1	2	<b>5</b>
Bidang Usaha Mikro	-	1	-	2	2	<b>5</b>
Bidang Industri	-	-	-	5	1	<b>6</b>
UPT Logam	-	-	2	5	-	<b>7</b>
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>34</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2023



**Gambar 1.4 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta terdiri dari 16 orang laki-laki (47%) dan 18 orang perempuan (53%). Hal ini menunjukkan bahwa di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sudah mencerminkan kesetaraan gender. Profil pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin disajikan Tabel 1.4 dan Gambar 1.5

**Tabel 1.4**

**Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan Jenis Kelamin**

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sekretariat	3	8	<b>11</b>
Bidang Koperasi	3	2	<b>5</b>
Bidang Usaha Mikro	2	3	<b>5</b>
Bidang Industri	2	4	<b>5</b>
UPT Logam	6	1	<b>7</b>
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2023



**Gambar 1.5 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

### **1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana**

Secara umum sarana prasarana Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, terutama sarana prasarana pokok berupa meja kerja, komputer dan jaringan internet, cukup memadai. Tersedia meja kerja bagi semua pegawai. Semua komputer dan Laptop tersambung jaringan internet. Tersedia pula 1 unit genset yang cukup untuk menghidupkan semua komputer dan lampu ruangan kerja apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 4 bagi Kepala Dinas dan semua pejabat eselon III (sekretaris dan kepala bidang). Untuk pejabat eselon IV, tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 2 per orang. Secara rinci sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tersaji pada tabel 1.5.

**Tabel 1.5****Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kota Yogyakarta**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Kendaraan roda empat	9 buah
Kendaraan roda dua	17 buah
Ruang rapat	2 buah
Mesin ketik	12 buah
Komputer	buah
Lap top	14 buah
Printer	28 buah
LCD Proyektor	2 buah
Telepon/mesin fax	9 buah
Kamera	3 buah
Handycam	1 buah
TV Berwarna	2 buah
Wireless	2 buah
Meja Kerja	147 buah
Kursi Kerja	70 buah
Meja Rapat	79 buah
Kursi Rapat	64 buah
Almari	34 buah
Filling Cabinet	30 buah
Cash Box	6 buah
Genset	1 unit

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2023

**1.6 Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.504.205.630,- (anggaran perubahan) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 15.151.037.630,- dan belanja modal sebesar Rp 353.168.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan

langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disajikan secara rinci pada tabel 1.6.1

**Tabel 1.6**

**Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta TA 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
<b>BELANJA DAERAH</b>	
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.065.943.10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.839.750
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.244.117.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	986.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.292.350
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.818.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.038.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.352.008
Peningkatan Pelayanan BLUD	440.000.000
II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	202.986.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	202.986.000
III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	71.080.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.080.000
IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	349.968.388
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	349.968.388
V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	599.237.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	599.237.000
VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	610.186.679
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	610.186.679
VII. Program Pengembangan UMKM	1.214.423.455
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.214.423.455
VIII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.331.509.750
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	5.331.509.750
IX. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	9.060.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.060.000
IX. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.811.250
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	49.811.250

Sumber Data: Sub Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, Desember 2023

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2022*
4. *Instrumen Pendukung*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Tahun 2023 merupakan tahun transisi dalam periode pembangunan daerah jangka menengah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka kegiatan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Pada tahap yang lebih operasional RPD menjadi pedoman penyusunan rencana tahunan (RKPD dan Renja OPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD)

#### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”.

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 yang tercantum pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	Meningkatnya kualitas pariwisata	Meningkatnya kualitas pariwisata	
	3. Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), dean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan dama	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	

Sumber: RPD Kota Yogyakarta 2023-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah:

- Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran angka pertumbuhan ekonomi, melalui pendampingan izin usaha mikro (IUM) dan izin usaha industri, kemitraan dan pembiayaan, penumbuhan wirausaha baru, pameran dan promosi UMKM, pelatihan dan pendampingan bagi IKM, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota, pendataan IKM (Industri Kecil Menengah), pembinaan kelembagaan koperasi, pembinaan kelompok UKM kuliner peserta program Gandeng Gendong.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta mendukung terwujudnya misi Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa pada sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan misi tersebut maka ditentukan sasaran strategis Perangkat Daerah. Secara rinci sasaran strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tercantum pada Tabel 2. 2

**Tabel 2.2.**

#### **Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	368.330.174.952	369.330.174.952	370.330.174.952	371.330.174.952
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.040.000.000	5.760.000.000	6.480.000.000	7.200.000.000
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	16.425	18.718	21.012	23.305
		Nilai Investasi IKM	Rp	15.948.506.955	19.165.867.834	22.383.228.713	25.600.589.592
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A

Sumber: Metadata Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta 2023 - 2026

### 2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Tabel 2.3**  
**Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	2	3	4	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi		

				dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPT Logam)		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan

			(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang BLUD
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber: DPPA Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2023

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	
				MURNI	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	397.114.727.829	368.330.174.952
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.040.000.000	5.040.000.000
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	16.425	16.425
		Nilai Investasi IKM	Rp	15.948.506.955	15.948.506.955
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	60	A

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 Tahun 2023 tidak ada perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mengampu 3 urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari dua urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan koperasi dan urusan UKM, satu urusan pilihan, yaitu urusan industri. Terdapat 8 (Delapan) program yang dijalankan untuk mengampu urusan-urusan tersebut dan satu program pendukung yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja murni sebesar Rp 13.557.028.107,- dan anggaran pendapatan sebesar Rp 497.021.719. Anggaran tersebut mengalami perubahan melalui

mekanisme perubahan APBD 2022, anggaran belanja menjadi Rp 15.504.205.630 dan anggaran pendapatan menjadi Rp 440.000.000. Terdapat peningkatan pada kelompok belanja daerah, sedangkan pada kelompok pendapatan daerah mengalami penurunan. Penurunan rencana pendapatan disebabkan pendapatan BUKP berpindah menjadi kewenangan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

### 2.3.1. Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Tahun 2023 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran belanja melalui APBD Murni sebesar Rp 13.557.028.107 dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp 13.264.478.107 dan belanja modal sebesar Rp 292.550.000. Pada APBD Perubahan 2023, alokasi keseluruhan mengalami peningkatan menjadi Rp 15.504.205.630. Alokasi belanja modal mengalami peningkatan menjadi Rp 353.168.000. Sedangkan alokasi belanja operasi naik menjadi Rp 15.151.037.630.

**Tabel 2.5**  
**Target Belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kota Yogyakarta APBD Murni dan Perubahan Tahun 2023**

Uraian	Target Murni	Target Perubahan
<b>Belanja Operasi</b>	13.264.478.107	15.151.037.630
<b>Belanja Modal</b>	292.550.000	353.168.000
<b>Jumlah</b>	13.557.028.107	15.504.205.630

### 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Total Anggaran belanja daerah Tahun 2023 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah Rp 5.581.452.110 dengan rincian sebesar Rp 2.147.487.040 digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat dan anggaran sebesar Rp 3.433.965.070 untuk mendukung pencapaian sasaran Kinerja sektor perindustrian meningkat.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Belanja Daerah per Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023**

No.	Sasaran	Anggaran Murni	Persentase Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Persentase Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	1.815.344.907	13,39 %	3.047.881.522	19,66 %	Bidang Koperasi dan Bidang UKM Terdiri dari 6 program
2	Kinerja sektor perindustrian meningkat	5.752.415.750	42,43 %	5.830.381.000	37,61 %	Bidang Industri dan UPT Logam Terdiri dari 3 program
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.989.267.450	44,18 %	6.625.943.108	42,74 %	Sekretariat terdiri dari 1 program
Jumlah		13.557.028.107	100,00	15.504.205.630	100,00	

Sumber: DPPA Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta 2023

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase capaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi, yakni semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggunakan rumus diatas, berlaku untuk semua indikator kinerja. Hal itu dikarenakan sifat ketiga indikator kinerja sama yakni semakin tinggi realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023		REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA KINERJA
				MURNI	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	Rp	397.114.727.829	368.330.174.952	397.157.422.559	107,80 %	Sangat Baik
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	Rp	5.040.000.000	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Orang	16.425	16.425	17.944	109,25 %	Sangat Baik
		Nilai Investasi IKM	Rp	15.948.506.955	15.948.506.955	29.830.452.498	187,04 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A*	100 %	Sangat Baik

Sumber: Desk Timbal Balik Tri bulan IV TA 2023

\*Data yang digunakan adalah data hasil penilaian tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	Nilai omset koperasi	Nilai omset koperasi yang dibina tahun n
		Nilai omset UKM Usaha Mikro	Nilai Omset UKM Usaha Mikro yang dibina tahun n
2	Kinerja Sektor Perindustrian Meningkat	Jumlah Tenaga Kerja IKM	Rekapitulasi tenaga kerja IKM yang dibina
		Nilai Investasi IKM	Nilai investasi IKM yang dibina tahun n
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Sumber: Metadata Renstra

### **Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran perangkat daerah tahun 2023**

Dari tabel 3.2, diketahui bahwa seluruh indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2023 terpenuhi dengan predikat kinerja sangat baik. Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM memiliki dua sasaran dengan tiga indikator kinerja. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM memiliki dua indikator kinerja yakni Nilai Omset Koperasi dan Nilai Omset UKM Usaha Mikro. Target kinerja indikator Nilai Omset Koperasi adalah Rp 397.114.727.829 pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2023. Target tersebut diubah menjadi Rp 368.330.174.952 pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Realisasi atas target tersebut sebesar Rp 397.157.422.559. Dengan demikian, capaian kinerjanya sebesar 107,80 %.

Indikator kinerja Nilai Omset UKM Usaha Mikro, target yang ditetapkan sebesar Rp 5.040.000.000. Realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar Rp 5.583.232.560. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 110,78 %.

Sebagai usaha untuk mencapai target kinerja, dilaksanakan sejumlah upaya. Indikator kinerja Nilai Omset Koperasi diwujudkan melalui pelaksanaan empat program kerja, antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Sedangkan indikator kinerja Nilai Oset UKM Usaha Mikro diwujudkan melalui pelaksanaan dua program kerja yakni, Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM terdiri dari satu kegiatan, yaitu Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Program Pengembangan UMKM terdiri dari satu kegiatan yakni Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.

Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri memiliki dua indikator kinerja antara lain Jumlah Tenaga Kerja IKM dan Nilai Investasi IKM. Target indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM ditetapkan sebesar 16.425 orang dan terealisasi sebesar 17.944. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 109,25 %. Sedangkan target indikator Nilai Investasi IKM sebesar Rp 15.948.506.955, terealisasi Rp 29.830.452.498. Capaian kinerja indikator ini adalah 187,04 %.

Untuk mewujudkan target sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri, dilaksanakan empat program kerja antara lain Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Program Pengendalian Izin Usaha Industri terdiri dari satu kegiatan yakni Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS.

Terdapat satu kegiatan yang merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri. Kegiatan itu adalah Peningkatan Pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki satu indikator kinerja yakni Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target yang ditetapkan adalah nilai A. Realisasi indikator ini adalah A. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100 %.

Untuk mencapai indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini terdiri dari delapan kegiatan antara lain Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terdiri atas enam sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari lima sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari dua sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Kegiatan Administrasi Kepegawaian terdiri dari satu sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari empat sub kegiatan, meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak

dan Penggandaan; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan, antara lain Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari tiga sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**Tabel 3.4**  
**METADATA INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM**  
**TAHUN ANGGARAN 2023-2026**

**VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan**

Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Satuan	2023		2024	2025	2026
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Target Program PD	Target Program PD
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	unit	115	115	115	115	115
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n	unit	115	115	115	115	115

KSP/USP KOPERASI								
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n	orang	540	540	540	640	690
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat	unit	21	21	27	33	39
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	Wirausa ha	100	100	100	100	100
	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	Wirausa ha	400	425	400	400	400
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	UMKM	35	35	40	45	50
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	11 %	12,05 %	6,9 %	7,6 %	8,30 %
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	%	3 %	4 %	1,87%	2,14 %	2,40 %
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pendapatan UPT logam	Pendapatan UPT logam tahun n	Rp	440.000.000	467.746.358	490.500.000	500.000.000	530.000.000
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	Nilai	A	A*	A	A*	A

\*a dalam data capaian tahun sebelumnya karena hasil penilaian tahun 2023 belum final.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran program Dinas Perinkopukm tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Akuntabilitas baik yang dimaksud adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM). Tahun 2023 target indikator kinerja ini adalah 115 unit koperasi. Realisasi target kinerja jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik sebesar 115 unit koperasi. Dengan demikian capaian kinerja target ini mencapai 100%.  
Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Pada tahun 2023 dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi kepada 156 koperasi.
  - b) Klinik Koperasi Sehat, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan kompetitif.
  - c) Melaksanakan Pemeringkatan Koperasi. Pemeringkatan Koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pemeringkatan koperasi memberikan nilai dan pengelompokan koperasi menjadi koperasi berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Tahun 2023 dilakukan pemeringkatan koperasi bagi 50 koperasi.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu target kinerja yakni jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat. Formula penghitungannya adalah jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n (tahun berjalan). Target kinerja indikator ini pada tahun 2023 yakni 115 unit koperasi.

Sedangkan realisasinya sebesar 115 unit koperasi. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target kinerja program ini dilaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Melalui aktivitas ini, permasalahan yang dihadapi koperasi juga dapat dideteksi. Hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian koperasi antara lain prinsip perkoperasian, legalitas lembaga dan manajemen. Prinsip perkoperasian meliputi tata Kelola koperasi, kecukupan permodalan, pengelolaan permodalan, profil resiko. Legalitas lembaga meliputi legalitas badan hukum, legalitas izin usaha, keanggotaan dan kelengkapan organisasi. Sedangkan aspek manajemen mencakup Manajemen Umum, Manajemen Kelembagan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset dan Manajemen Likuiditas.

Aktivitas penilaian Kesehatan koperasi ini menyoar 115 koperasi. Dengan dilaksanakannya Penilaian Kesehatan Koperasi diharapkan koperasi di masa depan mampu memberikan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun n (tahun berjalan). Tahun 2023 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 540 orang. Sedangkan realisasinya sebesar 540 orang. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Aktivitas yang dilakukan antara lain:

- a) Bimbingan Teknis Perkoperasian
- b) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP
- c) Temu Koordinasi Peserta Diklat DAK
- d) Diklat sertifikasi dan uji kompetensi
- e) Pendampingan pasca diklat

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Formula penghitungannya adalah Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat. Tahun 2023 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 21 unit dan terealisasi sebesar 21 unit. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan satu sub kegiatan yaitu Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a) Melaksanakan pameran produk-produk koperasi. Pada tahun 2023 dilakukan Gelar Potensi Koperasi pada rangkaian Peringatan Hari Koperasi Kota Yogyakarta, turut serta sebagai peserta pameran pada Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional dan Pameran Smaradahana pada bulan Desember.
  - b) Pembinaan kelompok Pra Koperasi.
  - c) Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2023 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
  - d) Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2023 telah dilaksanakan Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan pameran.
  - e) Pembuatan iklan layanan masyarakat tentang koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan Jumlah UKM ber-NIB.
- Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 100 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.
- Jumlah UKM ber-NIB, formula penghitungan indikatornya adalah Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 400 UMKM dan terealisasi sebesar 425 UMKM. Capaian kinerja indikator ini sebesar 107 %.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan memiliki tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a) Melakukan pendataan UMKM
- b) Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.
- c) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM, diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.
- d) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gendong sebanyak satu angkatan, diikuti oleh 30 orang peserta.
- e) Pelatihan Home Business Camp (HBC)
- f) Pelatihan Karang Mitra Usaha (KaMU)
- g) Pelatihan Manajemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh 30 orang peserta
- h) Pendampingan intensif pasca pelatihan
- i) Pembuatan iklan layanan masyarakat dan program televisi
- j) Fasilitasi tempat promosi bagi peserta pelatihan HBC dan KaMU

6. Program pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah UKM Mandiri. Formula penghitungannya adalah Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 35 UMKM dan terealisasi 35 UMKM. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dan memiliki satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a) Kegiatan Peningkatan Produktifitas dan Pemasaran Serta Pengembangan UKM, dilaksanakan dalam 2 angkatan dengan peserta masing-masing 30 orang.

- b) Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta. Sebagai salah satu kegiatan yang berguna bagi pelaku usaha untuk menambah informasi bagi perbaikan produknya dan dapat memotivasi masyarakat untuk berwirausaha
  - c) Pameran dan promosi produk UMK.
  - d) Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak. Upaya untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM baik produk diluar daerah maupun di dalam daerah melalui media.
  - e) Penyaluran tenda kerucut bagi UMKM di wilayah Kemantren melalui mekanisme hibah.
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi. Formula penghitungan indikator ini adalah IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi dibagi total jumlah IKM Kota Yogyakarta dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator ini adalah 11 % dan terealisasi sebesar 12,05 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 109,55 %.
- Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan tiga sub kegiatan antara lain Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan program ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Industri antara lain:
- a) Pendampingan kepada IKM Kerajinan
  - b) Kajian Pengembangan Sentra di 14 Kecamatan
  - c) Kajian Persiapan Pendirian PDIN
  - d) Pelatihan Manajemen Usaha
  - e) Pelatihan Teknis Produksi
  - f) Pelatihan Diversifikasi Produk
  - g) Fasilitasi dan Pendampingan Anggota Dekranasda
  - h) Fasilitasi Registrasi HAKI
  - i) Fasilitasi promosi
  - j) Pameran produk IKM
  - k) Pembuatan video profil IKM
  - l) Promosi dan sosialisasi melalui program televisi
  - m) Diseminasi konsep industry hijau

- n) Sosialisasi Program Unggulan Bidang Industri melalui Medsos
- o) Penguatan kelembagaan IKM
- p) Pendampingan bagi IKM
- q) Business Matching
- r) Penguatan P3DN

Sedangkan upaya-upaya yang dijalankan oleh UPT Logam antara lain:

- a) Fasilitasi Pelayanan UPT Logam
- b) Fasilitasi Pelayanan PDIN
- c) Pelatihan Pengelolaan Usaha Pengecoran
- d) Pelatihan Proses Trimming dan Melting untuk Penggunaan Mesin Injeksi
- e) Pendampingan Kolaboratif Inovasi Desain Produk IKM
- f) Penyuluhan Pengelolaan Sentra IKM
- g) Pelatihan Dasar Moulding IMDIA
- h) Pelatihan Perancangan Peralatan Penepat (JIG) bagi Pengelola UPT Logam
- i) Pelatihan CAD Lanjut bagi Operator dan Pengelola UPT Logam
- j) Pelatihan Pola Kayu Dasar
- k) Pelatihan Setter Mesin Injeksi
- l) Pendukung Layanan UPT Logam
- m) Pelatihan Manajemen Sosmed
- n) Pelatihan Desain Produk
- o) Pelatihan Pemrograman Mesin
- p) Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM
- q) Pendampingan Kemitraan
- r) Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Data Informasi Industri yang ter-update. Formula penghitungannya adalah data IKM yang ter-update) dibagi total Data IKM dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk indikator ini adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 100 %.

Program ini memiliki satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota; dan satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan:

- a) updating data IKM
- b) Penyampaian informasi industry dalam SIINAS

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki dua indikator kinerja yakni yakni pendapatan UPT Logam dan nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat. Formula penghitungan indikator pendapatan UPT Logam adalah pendapatan UPT Logam tahun n (tahun berjalan). Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar Rp 440.000.000 dan membukukan realisasi sebesar Rp 467.746.358. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 106,31 %. Sedangkan indikator nilai SAKIP hasil penilaian Inspektorat, target yang ditetapkan adalah A, dan terealisasi dengan nilai A. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100 %.

Dari uraian diatas diketahui bahwa dari dua belas indikator kinerja program, seluruhnya membukukan capaian kinerja yang baik. Seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target. Capaian ini menjadi modal untuk senantiasa menjaga kinerja organisasi selalu baik di masa mendatang.

### **3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **3.2.1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Tolok ukur capaian sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkatkan diukur dengan dua indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Nilai omset koperasi dan Nilai omset UKM Usaha Mikro. Sedangkan sasaran Kinerja Sektor Perindustrian Meningkatkan diukur dengan satu indikator, yakni Nilai Omset IKM. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Kinerja sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkatkan dengan indikator Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai omset koperasi	406.366.988.994	336.557.181.503	82,82 %	368.330.174.952	397.157.422.559	107,80 %
Nilai omset UKM Usaha Mikro	6.709.320.338	6.720.239.196	100,16 %	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78 %
Nilai Omset IKM	248.755.928	798.139.000	320,85 %	-	-	-
Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	-	16.425	17.944	110 %
Nilai Investasi IKM	-	-	-	15.948.506.955	29.830.452.498	187 %
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Sumber: Metadata Renstra

Melalui Keputusan Wali Kota Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, telah ditetapkan indikator dan target kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta sebagaimana termuat pada tabel diatas. Terdapat tiga indikator kinerja tahun 2023 yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Nilai omset koperasi; Nilai omset UKM Usaha Mikro dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Sedangkan indikator Nilai Investasi IKM dan indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan indikator yang baru berlaku pada tahun 2023. Indikator baru ini ditetapkan karena indikator lama, yakni Nilai Oset IKM, capaiannya telah jauh melampaui target. Dengan demikian dibutuhkan indikator kinerja baru yang lebih relevan.

Indikator sasaran Nilai Omset Koperasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 397.157.422.559. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yakni sebesar Rp 336.557.181.503. Capaian tersebut merupakan capaian yang istimewa mengingat pemberlakuan regulasi perkoperasian yang baru berpotensi menggerus capaian omset pada koperasi-koperasi di Kota Yogyakarta.

Indikator sasaran Nilai omset UKM Usaha Mikro pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 5.583.232.560. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, realisasi tersebut lebih rendah. Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 6.720.239.196. Meski demikian, realisasi pada tahun 2023 memenuhi

target yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, yakni sebesar Rp 5.040.000.000.

Indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada tahun 2023 terealisasi dengan nilai A. Realisasi tersebut sama dengan capaian pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan apa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta secara umum telah berada pada jalur yang benar sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

### 3.2.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.6**  
**Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Akhir**

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Persentase Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Nilai omset koperasi	336.557.181.503	371.330.174.952	90,64	
Nilai omset UKM Usaha Mikro	6.720.239.196	7.200.000.000	93,34	
Jumlah Tenaga Kerja IKM	17.944	23.305	77,00	
Nilai Investasi IKM	29.830.452.498	25.600.589.592	116,52	
Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	25,00	Dikarenakan periode perencanaan berlaku empat tahun dan target sama pada setiap tahunnya, maka penghitungan prosentase capaian juga dibagi empat

Sumber: Metadata Renstra

Tahun 2023 merupakan awal periode perencanaan tahun 2023 – 2026. Berdasarkan realisasi indikator sasaran tahun 2023 dan target pada akhir tahun 2026, hampir seluruhnya mendekati target. Dengan demikian, secara optimis seluruh target pada tahun 2026 dapat tercapai. Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan dapat terus dilanjutkan dengan perluasan sasaran penerima manfaat agar dapat meraih target tersebut.

### **3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas**

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta maka dilakukan perbandingan dengan indikator kinerja pada instansi pengampu urusan yang sama pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang setara.

Indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tidak dapat dibandingkan secara mutlak dengan indikator kinerja nasional, provinsi maupun organisasi sejenis lainnya. Mengingat penentuan indikator kinerja merupakan kewenangan masing-masing organisasi. Meski demikian, indikator kinerja antar organisasi dapat saling terkait.

Nilai realisasi atas target tidak dapat dibandingkan mengingat data realisasi kinerja pada lembaga di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang setara belum dirilis oleh instansi berwenang. Maka yang dapat dibandingkan adalah indikator kinerja pada masing-masing instansi pengampu.

Pada urusan koperasi dan UKM, terdapat 12 indikator kinerja di tingkat nasional yang diampu oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sedangkan pada tingkat provinsi terdapat 10 indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun indikator kinerja pada instansi-instansi tersebut berbeda-beda namun memiliki benang merah dan korelasi. Indikator kinerja urusan koperasi dan UKM pada tingkat Kota Yogyakarta, mendukung pencapaian indikator kinerja urusan koperasi dan UKM di tingkat provinsi. Indikator kinerja Nilai omset koperasi dan Nilai omset UKM usaha mikro mendukung indikator Jumlah omset Koperasi dan UMKM pada tingkat provinsi. Meskipun secara tidak linear, indikator kinerja urusan koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM juga mendukung indikator Persentase kontribusi koperasi terhadap PDB dan Persentase kontribusi UMKM terhadap PDB di tingkat nasional.

Pada urusan industri, terdapat 4 indikator kinerja pada tingkat nasional yang diampu oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sedangkan pada tingkat provinsi terdapat 1 indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta memiliki dua indikator kinerja urusan industri. Indikator Jumlah Tenaga Kerja IKM mendukung pencapaian indikator kinerja Tenaga kerja di sektor industri nonmigas yang merupakan indikator kinerja tingkat nasional yang diampu oleh Kementerian Perindustrian RI. Sedangkan indikator Nilai Investasi IKM secara tidak linier mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY dan indikator kinerja Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB pada tingkat nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta telah sinkron dengan indikator kinerja pada tingkat provinsi dan nasional.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dengan Indikator Kinerja Nasional, DIY dan Kabupaten Kulon Progo**

Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
2	3	4			
<b>Urusan Koperasi dan UKM</b>					
<b>Nasional</b>					
Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase kontribusi koperasi terhadap PDB	5,3 %		5,4 %	
	Persentase kontribusi UMKM terhadap PDB	63 %		64 %	
	Rasio kewirausahaan nasional	3,75 %		3,85 %	
Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	Persentase koperasi berkualitas	7,5 %		7,5 %	
	Pertumbuhan volume usaha koperasi	16 %		18 %	
	Jumlah koperasi modern	150 unit		150 unit	
Transformasi usaha mikro dari informal ke formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	4 %		4 %	
	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	27,8 %		29,1 %	
Transformasi UKM masuk dalam rantai pasok	Persentase kontribusi UKM terhadap ekspor non migas	15,8 %		16,4 %	
	Tingkat implementasi kemitraan strategis UKM	65 %		70 %	
Pertumbuhan wirausaha produktif	Persentase pertumbuhan wirausaha	3,0 %		3,5 %	
	Jumlah start up	100		150	
<b>DIY</b>					

Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	Meningkatnya jumlah koperasi modern	-	-	5	N/A*
	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	-	-	1450	N/A
	Meningkatnya jumlah wirausaha	-	-	3865	N/A*
	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	-	-	130	N/A*
	Jumlah omset Koperasi dan UMKM	-	-	17.863.000.000.000	N/A
	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	-	-	3,75	N/A
	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	4.308.794.000.000	4.404.185.000.000	-	-
	Meningkatnya nilai omset UKM yang dibina	11.347.000.000.000	11.700.000.000.000	-	-
Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	0,4 %	0,47 %	-	-
	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	-	-	3,75	N/A
<b>Kota Yogyakarta</b>					
Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	Nilai omset koperasi	406.366.988.994	336.557.181.503	368.330.174.952	397.157.422.559
	Nilai omset UKM Usaha Mikro	6.709.320.338	6.720.239.196	5.040.000.000	5.583.232.560
<b>Kab. Kulon Progo</b>					
Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	612.790.000	1.328.550.000	685.949.407	N/A
	Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi	19,42 %	19,98 %*	76.843.230.000	N/A
<b>Urusan Industri</b>					
<b>Nasional</b>					
Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5,26 %	5,01	7,8 %	N/A*

	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	17,95 %	16,48 %	18,6 %	N/A*
	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	20,84 Juta orang	19,11	21,5 Juta orang	N/A*
<b>DIY</b>					
Meningkatnya industri pengolahan	Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY	Rp 14.216.000.000.000	Rp 13.392.567.000.000	Rp 13.060.000.000.000	N/A
<b>Kota Yogyakarta</b>					
Meningkatnya kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	16.425	17.944
	Nilai Investasi IKM	-	-	15.948.506.955	29.830.452.498
<b>Kab. Kulon Progo</b>					
Meningkatnya usaha industri dan perdagangan	Nilai Usaha Industri	Rp 2.535.146.000.000	Rp 2.542.338.000.000	Rp 1.849.243.150.000	N/A

\*Data belum rilis oleh lembaga bersangkutan.

Sumber: - Renstra Kementerian Perindustrian 2020 – 2024  
- Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020 - 2024  
- RPJMD DIY 2022-2027  
- Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kulon Progo 2023-2026  
- Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2023 – 2026  
- LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022  
- LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kulon Progo Tahun 2022  
- LKJIP Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo 2022

### 3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari uraian-uraian sebelumnya, tampak bahwa seluruh indikator kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta telah tercapai, bahkan ada yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Fasilitasi dan dukungan pendampingan dengan skema coaching, pelatihan kelas dan mentoring.
2. Adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan dalam urusan industri, koperasi dan UMKM. Sinergitas antara para pemangku kepentingan koperasi seperti Dekopinda, Absindo dan Forum Komunikasi Koperasi se-Kota Yogyakarta, Forum Komunikasi UMKM, Dekranasda, Pusat Studi di Perguruan Tinggi dan para ahli/praktisi, mempermudah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan sehingga tujuan menjadikan IKM (Industri Kecil dan Menengah), koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) maju dan berkembang dapat tercapai.

3. Adanya pameran-pameran baik yang baik yang ditujukan bagi IKM, UMKM maupun Koperasi yang menjadi ajang untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan, mempertemukan dengan pembeli atau relasi usaha sehingga berujung pada peningkatan omset.
4. Pemberian hibah tenda sebagai stimulus pemasaran bagi pelaku UMKM di wilayah Kemantren.
5. Fasilitasi sewa tempat bagi pelaku UMKM peserta pelatihan (HBC dan KaMU) dan tersedianya gerai bagi pelaku UMKM di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, membantu pelaku UMKM dalam pemasaran produk.
6. Layanan terpadu HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang membantu IKM dalam konsultasi, pendaftaran hingga komersialisasi HAKI
7. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya memicu peningkatan kinerja sektor industri.

### 3.2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan terdapat efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table 3.8 berikut:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Nilai (Rp)	%
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	368.330.174.952	397.157.422.559	107,80 %	1.223.271.388	1.222.835.250	99,96 %	436.138	0,04 %
	Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78 %	1.824.610.134	1.769.833.750	97,00 %	54.776.384	3,00 %
Kinerja sektor industri meningkat	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425	17.944	110 %	49.811.250	49.811.250	100 %	0	0 %
	Nilai Investasi IKM	15.948.506.955	29.830.452.498	187 %	5.340.569.750	4.988.733.081	93,41 %	456.679.859	6,59 %
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	100 %	7.065.943.108	6.609.263.249	93,47 %	351.836.669	6,53 %

Sumber: SPJ Fungsional Desember 2023, Subbag Keuangan dan PEP Di nas Perindustrian, Koperasi, UKM

Sasaran Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.223.271.388 untuk mendukung indikator Nilai omset koperasi dan Rp 1.824.610.134 untuk mendukung indikator Nilai omset UKM usaha mikro. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 1.222.835.250 atau 99,96 % pada indikator Nilai omset koperasi dan Rp 1.769.833.750 atau 97,00 % pada indikator Nilai omset UKM usaha mikro.

Sasaran Kinerja sektor industri meningkat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.340.569.740 untuk indikator Nilai investasi IKM dan Rp 49.811.250 untuk indikator Jumlah tenaga kerja IKM. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 4.988.733.081 untuk indikator Nilai investasi IKM dan Rp 49.811.250 untuk indikator Jumlah tenaga kerja IKM.

Sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi sebesar Rp 7.065.943.108 dan terealisasi sebesar Rp 6.609.263.249.

Dengan tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran maka dapat disimpulkan anggaran pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta cukup untuk mendukung pencapaian kinerja.

### 3.2.6. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan pada indikator sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target atau melampaui target kinerja. Terdapat empat indikator kinerja yang mengalami efisiensi dimana target kinerjanya tercapai sedangkan penyerapan anggarannya dibawah 100%. Efisiensi ini disebabkan oleh kehati-hatian dan kecermatan pelaksana kegiatan dalam mengelola anggaran agar tidak salah sasaran.

**Tabel 3.9**  
**Analisis Efisiensi**

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	107,80 %	99,96 %	0,04 %
	Nilai omset UKM Usaha Mikro	110,78 %	97,00 %	3,00 %
Kinerja sektor industri meningkat	Nilai Investasi IKM	187 %	93,41 %	6,59 %
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	100 %	93,47 %	6,53 %

Sumber: SPJ Fungsional Desember 2022, Subbag Keuangan dan PEP Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

### **3.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

a. Urusan Industri, kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- 1) Pendampingan kepada IKM Kerajinan
- 2) Pelatihan Manajemen Usaha
- 3) Pelatihan Teknis Produksi
- 4) Pelatihan Diversifikasi Produk
- 5) Pelatihan Komunikasi
- 6) Fasilitasi dan Pendampingan Anggota Dekranasda
- 7) Fasilitasi Registrasi dan komersialisasi HAKI
- 8) Fasilitasi promosi

b. Urusan Koperasi, kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- 1) Pengawasan Koperasi
- 2) Klinik Koperasi Sehat
- 3) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
- 4) Penilaian Koperasi
- 5) Pembinaan Koperasi
- 6) Bimtek bagi SDM Koperasi

c. Urusan UMKM, kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- a) Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM
- b) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM
- c) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gandong
- d) Pelatihan Manajemen Resiko bagi Wirausaha Baru
- e) Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta.
- f) Pameran dan promosi produk UMK

d. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah, kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan
- b) Penyusunan Dokumen Penganggaran
- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
- d) Penyusunan Laporan Kinerja

- e) Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN
- f) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- g) Pengelolaan arsip secara digital.

### 3.2.8. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, lebih khususnya di sistematika penyusunan dokumen renja tidak tercantum secara eksplisit untuk menyertakan dokumen GAP/GBS sebagai salah satu syarat dalam penyusunannya. Meski demikian, penyusunan GAP/GBS menunjukkan kepedulian pada isu gender yang berkembang.

Tahun 2023 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada sebagian kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan dokumen tersebut merupakan salah satu upaya untuk memenuhi unsur Perencanaan Penganggaran Perspektif Gender. GAP dan GBS diterapkan pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkhusus Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 369.307.019.

**Tabel. 3.10**  
**Implementasi Kebijakan/Program/Kegiatan Tentang Bantuan Usaha dan / atau Membangun Hubungan Kemitraan Bagi Perempuan Kepala Keluarga untuk Berwirausaha**

Kebijakan/Program/Kegiatan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha	Evaluasi Singkat tentang Kebijakan/Program/Kegiatan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Akses Perempuan Kepala Keluarga dalam Berwirausaha		Rencana Tindak Lanjut setelah Evaluasi
	Capaian Keberhasilan	Tantangan dan Kendala	
Program Pemberdayaan UMKM, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	30 Perempuan Kepala Keluarga mengikuti kegiatan	SOP pencocokan data kependudukan membutuhkan waktu	Program dilanjutkan dengan peningkatan kerjasama akses data kependudukan

Sumber: Laporan Aksi 1 RANHAM 2023

### 3.2.9. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial dan google untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, antara lain :
  - Aplikasi e-Office, untuk mempermudah dalam surat menyurat
  - Layanan pengaduan JSS, merupakan saluran untuk menyampaikan pengaduan atas layanan Pemerintah Kota secara umum dan teradministrasi dengan baik
  - Aplikasi e-SAKIP, untuk mempermudah penerapan SAKIP tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun tingkat OPD
  - Aplikasi e-Nglarisi, sarana bagi UMKM/IKM untuk menjadi penyedia jasa konsumsi rapat/pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

### 3.2.10. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melakukan kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Para pemangku kepentingan ini berasal dari internal pemerintahan maupun pihak non pemerintahan. Kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan organisasi tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11**

**Inventarisasi Peran Lintas Sektor Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2023**

No	Pihak / Stakeholder	Kontribusi	Manfaat	
			Bagi OPD	Bagi Kelompok Sasaran
1	Dinas Koperasi dan UKM DIY	Memberikan arah kebijakan, konsultasi dan fasilitasi dalam program kerja yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Memperbesar peluang koperasi dan UMKM di Kota Yogyakarta untuk lebih berkembang
2	Lembaga Keuangan (Bank BPD, Bank Jogja)	Memberikan literasi keuangan kepada kelompok sasaran  Penyampaian informasi pinjaman yang dapat diakses oleh UMKM	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait finansial

				Mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan
3	Lembaga Pendamping Halal(UIN)	Mendampingi UKM dalam melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka proses penetapan halal ke MUI sampai proses sertifikasi halal keluar (sertifikasi halal self declare)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan kualitas produk UMKM/IKM dan kepercayaan konsumen
4	Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta	Menyediakan gerai untuk UMKM	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan promosi dan penjualan produk UMKM
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Memberikan arah kebijakan, konsultasi dan fasilitasi dalam program kerja yang berkaitan dengan IKM (Industri Kecil dan Menengah)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Memperbesar peluang IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Yogyakarta untuk lebih berkembang
6	LPPM UII	Memberikan edukasi mengenai HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait HAKI
7	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Memberikan edukasi dan menerbitkan sertifikasi P-IRT	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Meningkatkan kualitas produk UMKM/IKM dan kepercayaan konsumen
8	Pelaku bisnis	Turut serta dalam kegiatan pertemuan antara pelaku bisnis dengan calon mitra distribusi, calon mitra supplier, calon mitra pendanaan dan investor (businessmatching)	Mendukung pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta	Memperluas koneksi dan peluang usaha bagi IKM/UMKM

### 3.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp 14.640.476.580 atau sebesar 94,43% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 15.504.205.630. Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Anggaran belanja apabila dirinci antara belanja gaji dan non gaji dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan tunjangan ASN	5.240.450.000	4.831.864.939	92,20 %

Sumber: SPJ Fungsional Desember 2023

Tabel 3.13

## Realisasi Anggaran Belanja diluar Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s/d Desember	% thd angg
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.504.205.630,00</b>	<b>14.640.476.580,00</b>	<b>94,43%</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.065.943.108,00</b>	<b>6.609.263.249,00</b>	<b>93,54%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.081.500,00	4.072.500,00	99,78%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	730.250,00	730.250,00	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	739.000,00	739.000,00	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.172.500,00	1.171.500,00	99,91%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	805.000,00	805.000,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.311.500,00	1.311.500,00	100,00%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.240.450.000,00	4.831.864.939,00	92,20%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	682.000,00	682.000,00	100,00%
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	612.500,00	612.500,00	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	496.000,00	99,20%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.872.500,00	1.872.500,00	100,00%
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	491.000,00	491.000,00	100,00%
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	495.000,00	495.000,00	100,00%
14	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000,00	500.000,00	100,00%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.177.100,00	70.177.100,00	100,00%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.914.250,00	20.914.250,00	100,00%
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000,00	1.920.000,00	96,97%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.221.000,00	148.180.631,00	98,64%
19	Pengadaan Mebel	79.839.500,00	79.839.500,00	100,00%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.978.500,00	169.803.500,00	99,31%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	100,00%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.596.000,00	12.126.561,00	96,27%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.942.000,00	538.762.000,00	99,97%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	22.729.800,00	21.655.950,00	95,28%

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.440.000,00	104.523.150,00	98,20%
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.182.208,00	195.808.208,00	99,81%
27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	440.000.000,00	399.208.710,00	90,73%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>202.986.000,00</b>	<b>202.986.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	202.986.000,00	202.986.000,00	100,00%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>71.080.000,00</b>	<b>71.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00%
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.280.000,00	59.280.000,00	100,00%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>349.968.388,00</b>	<b>349.932.250,00</b>	<b>99,99%</b>
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	349.968.388,00	349.932.250,00	99,99%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>599.237.000,00</b>	<b>598.837.000,00</b>	<b>99,93%</b>
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan	599.237.000,00	598.837.000,00	99,93%
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>610.186.679,00</b>	<b>584.352.500,00</b>	<b>95,77%</b>
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	161.847.160,00	161.841.000,00	100,00%
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	12.652.500,00	12.652.500,00	100,00%
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	435.687.019,00	409.859.000,00	94,07%
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>1.214.423.455,00</b>	<b>1.185.481.250,00</b>	<b>97,62%</b>
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	1.214.423.455,00	1.185.481.250,00	97,62%
<b>H</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>5.331.509.750,00</b>	<b>4.979.673.081,00</b>	<b>93,40%</b>
1	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	815.866.750,00	807.164.957,00	98,93%
2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	214.137.500,00	211.207.500,00	98,63%

3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.301.505.500,00	3.961.300.624,00	92,09%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.060.000,00</b>	<b>9.060.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUIPUIUKI dan IPKI Kewenanga	9.060.000,00	9.060.000,00	100,00%
<b>J</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>49.811.250,00</b>	<b>49.811.250,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	49.811.250,00	49.811.250,00	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.504.205.630,00</b>	<b>14.640.476.580,00</b>	<b>94,43%</b>

Sumber: SPJ Fungsional Desember 2023

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 5.240.450.000 sedangkan anggaran non gaji sebesar Rp 10.263.755.630. Realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 4.831.864.939 atau sebesar 92,20% dari total anggaran gaji dan tunjangan ASN. Hal ini disebabkan karena adanya pagu gaji dan tunjangan untuk PPPK yang masuk dalam formasi baru di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta namun baru aktif bekerja terhitung mulai bulan November 2023. Selain itu terdapat alokasi belanja yang dianggarkan namun tidak terealisasi yaitu iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baik PNS maupun PPPK. Sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 408.585.061. Sedangkan realisasi anggaran non gaji sebesar Rp 9.808.611.641 dari total anggaran Rp 10.263.755.630. Sisa anggaran pada belanja non gaji sebesar Rp 455.143.989.

Anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 8.438.262.522 yang terdiri dari Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengembangan UMKM, Program Perencanaan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp 1.825.493.108.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	368.330.174.952	397.157.422.559	107,80 %	15.504.205.630	14.640.476.580	94,43 %
	Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78 %			
Kinerja sektor industri meningkat	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425	17.944	110 %			
	Nilai Investasi IKM	15.948.506.955	29.830.452.498	187 %			
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	100 %			
Belanja gaji dan tunjangan ASN							
Belanja operasional utama					8.438.262.522	8.031.213.331	95,18 %
Belanja operasional pendukung					1.825.493.108	1.777.398.310	97,37 %
Jumlah					15.504.205.630	14.640.476.580	94,43 %

Sumber: SPJ Fungsional Desember 2023

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, makadapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	202.986.000	202.986.000	100 %
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	71.080.000	71.080.000	100 %
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	349.968.388	349.932.250	99,99 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	599.237.000	598.837.000	99,93 %

	PERLINDUNGAN KOPERASI			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	610.186.679	584.352.500	95,77 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.214.423.455	1.185.481.250	97,62 %
Kinerja sektor industri meningkat	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.331.509.750	4.979.673.081	93,40 %
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.060.000	9.060.000	100 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	49.811.250	49.811.250	100 %
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.065.943.108	6.609.263.249	93,54 %

Pada tabel 3.15 menampilkan realisasi anggaran masing-masing program. Seluruh program memiliki realisasi anggaran yang baik. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, namun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran dengan kriteria sangat baik dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 5 Berisi :**

#### **1. Kesimpulan**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan ditingkatkan upaya untuk mencapainya.

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah, seluruh sasaran perangkat daerah meraih kriteria kinerja "Sangat Baik". Sasaran kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat tercapai 110,80 % dan 110,78 %. Sasaran kinerja sector industry meningkat terealisasi 110 % dan 187 %. Sedangkan sasaran meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi 100 %.
2. Realisasi kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta secara umum telah mendekati target yang ditetapkan untuk akhir periode Renstra 2023 – 2026. Dengan demikian, target akhir Renstra 2023 – 2026 optimis dapat tercapai.
3. Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta berjalan secara efisien.
4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih peningkatan kinerja tetap harus dilakukan.

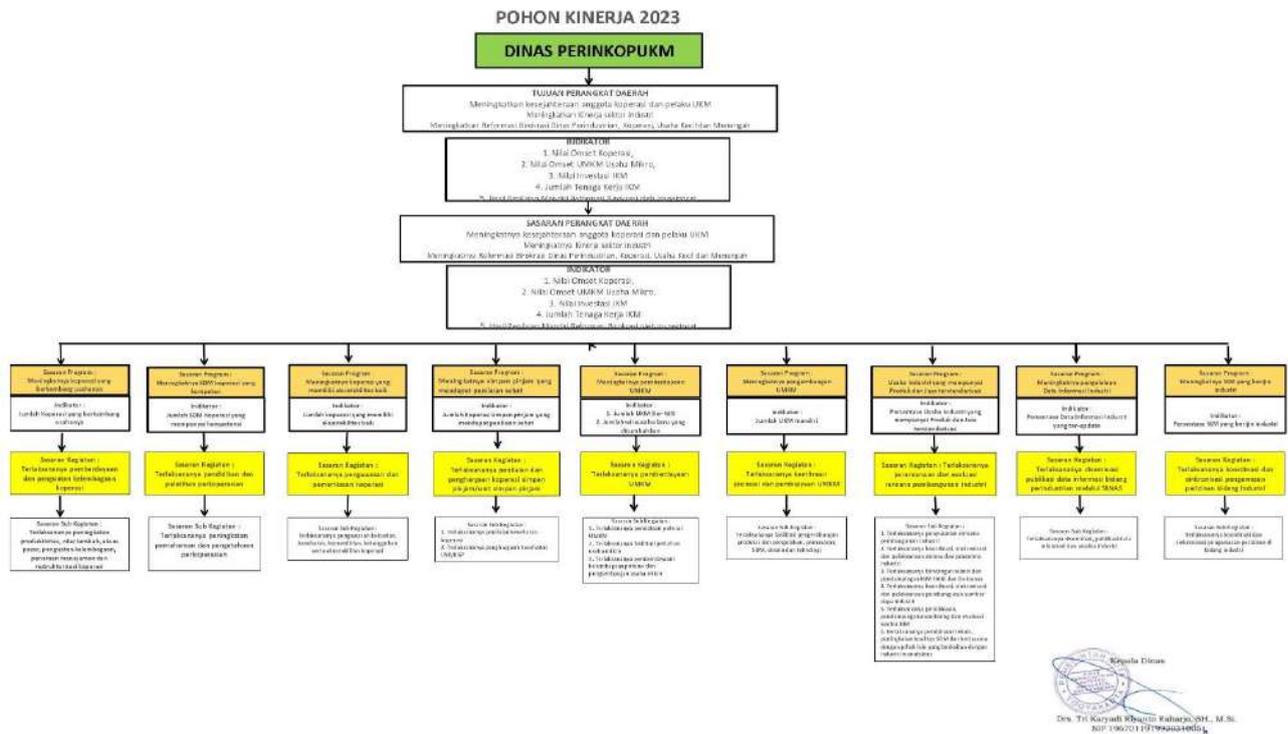
Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pola koordinasi internal dan eksternal
2. Reviu dan evaluasi kinerja dilakukan secara tertib dan berkala
3. Meningkatkan kapasitas pegawai
4. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait

**LAMPIRAN:**

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5. Pengukuran Kinerja
- Lampiran 6. Prestasi
- Lampiran 7. Berita Acara Desk Reviu Renstra

# Lampiran 1. Pohon Kinerja



## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2023



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦲꦠꦏꦂꦠ  
ꦢꦶꦤꦱꦼꦩꦶꦤꦠꦶꦫꦶꦤꦏꦺꦥꦼꦫꦶꦤꦠꦸꦁꦏꦺꦴꦏꦼꦗꦶꦏꦸꦏꦸꦩꦠꦺꦤꦺꦒꦲ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55185 Telp. ( 0274 ) 515865, 562682 Fax ( 0274 ) 520332

EMAIL : [perinkopukm@jojakota.go.id](mailto:perinkopukm@jojakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jojakota.go.id](mailto:upik@jojakota.go.id)

WEBSITE : [www.jojakarta.go.id](http://www.jojakarta.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUMADI, S.H., M.H.  
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
SUMADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630826 198903 1 007

Yogyakarta, 09 JAN 2023  
Pihak Pertama  
  
Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si  
NIP. 19670119 199203 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	Rp 397.114.727.829,00
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	Rp 5.040.000.000,00
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 Orang
		Nilai Investasi IKM	Rp 15.948.506.955,00
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi UKM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	60

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 152.227.000,00	APBD
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 71.080.000,00	APBD
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 290.809.523,00	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 343.064.250,00	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 543.806.679,00	APBD
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 844.220.955,00	APBD
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 4.823.681.000,00	APBD
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 9.060.000,00	APBD
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 49.811.250,00	APBD
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.429.267.450,00	APBD

  
 Pj. Walikota Yogyakarta  
SUMADI, S.H., M.H.  
 NIP. 19630826 198903 1 007

Yogyakarta, 09 JAN 2023  
 Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha  
 Kecil dan Menengah  
  
Drs. TRI KARYADI RIYANTO R. S.H., M.Si  
 NIP. 19670119 199203 1 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI UKM KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	368.330.174.952 Rupiah
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	5.040.000.000 Rupiah
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 Orang
		Nilai Investasi IKM	15.948.506.955 Rupiah
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi UKM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 202.986.000,00	APBD Perubahan
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 71.080.000,00	APBD Perubahan
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 349.968.388,00	APBD Perubahan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 599.237.000,00	APBD Perubahan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 610.186.679,00	APBD Perubahan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 1.214.423.455,00	APBD Perubahan
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 5.331.509.750,00	APBD Perubahan
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp 9.060.000,00	APBD Perubahan
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 49.811.250,00	APBD Perubahan
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.065.943.108,00	APBD Perubahan

Pj. Wali Kota Yogyakarta



SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed

Yogyakarta,  
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah



Drs. TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si  
NIP. 19670119 199203 1 005

### 3. Pengukuran Kinerja

**SIMONEVA** Sistem Manajemen Kinerja Selasa, 30 Januari 2024 10:01:27

**Indikator Program Tahun 2023**

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2023

Penyalah Deleah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program: PROGRAM PENYAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

**Tambah Indikator**

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Tahun Lalu	Target Fisik	Target Fisik Tahun Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
<input checked="" type="checkbox"/>	1	PROGRAM PENYAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	115	115	115	99	101	115	115	2023

**SIMONEVA** Sistem Manajemen Kinerja Selasa, 30 Januari 2024 10:01:27

**Indikator Program Tahun 2023**

Indikator Program Per Tahun

Tahun: 2023

Penyalah Deleah: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program: PROGRAM PENILAIAN KEBEHATAN KSP/USP KOPERASI

**Tambah Indikator**

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Tahun Lalu	Target Fisik	Target Fisik Tahun Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
<input checked="" type="checkbox"/>	1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi dengan program yang mendapat pemantauan	Jumlah koperasi dengan program yang mendapat pemantauan kesehatan kategori sehat tahun n	115	115	115	00	101	115	115	2023

#### 4. Tindak Lanjut LHE SAKIP

Matriks Tindak Lanjut  
Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perinkopukm Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progres
1	Menyusun SOP Mekanisme Implementasi Reward and Punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.	Menyusun SOP Mekanisme Implementasi Reward and Punishment	12 bulan	Januari - Desember 2023	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dalam proses
2	Menyesuaikan format pengukuran kinerja eselon IV/Sub-Koordinator yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota yang berlaku.	Menyesuaikan format pengukuran kinerja Koordinator yang telah dilaksanakan dengan yang diatur dalam Peraturan Walikota yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan	12 bulan	Januari - Desember 2023	Subbag Keuangan dan PEP	Dalam proses
3	Menyusun laporan kinerja pemerintah sesuai dengan sistematika laporan kinerja Perangkat Daerah pada Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan lebih cermat.	Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah sesuai dengan Sistematika Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Peraturan Walikota nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan lebih cermat.	4 bulan	Oktober 2023 - Januari 2024	Subbag Keuangan dan PEP	Dalam proses
4	Jika dimungkinkan untuk menambahkan perbandingan kinerja di level nasional/internasional.	Mencari referensi indikator kinerja di level nasional/internasional.	4 bulan	Oktober 2023 - Januari 2024	Subbag Keuangan dan PEP	Dalam proses

Lampiran 6. Prestasi

Lomba IFCA (Indonesian Fashion and Craft Awards) 2023 yang diadakan oleh BCIC (Bali Creative Industry Center), Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Juara 2 Kategori Craft.



**BERITA ACARA  
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023 - 2026**

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan pembahasan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 - 2026 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada daftar hadir.

**MENYEPAKATI**

I. Checklist Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun:

No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	BAB I. Pendahuluan	√		akan dilengkapi
2.	BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	√		akan dilengkapi
3.	BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	√		akan dilengkapi
4.	BAB IV. Tujuan dan Sasaran	√		akan dilengkapi
5.	BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	√		akan dilengkapi
6.	BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan	√		akan dilengkapi
7.	BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan	√		akan dilengkapi
8.	BAB VIII. Penutup	√		akan dilengkapi

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Visi Misi sesuai RPD 2023-2026	√		akan dilengkapi
2.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sudah ada, dengan target dan indikator untuk tahun 2023-2026	√		akan dilengkapi
3.	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat	√		akan dilengkapi
4.	Rencana Program, Kegiatan, serta	√		akan dilengkapi
5.	Sudah melengkapi data terbaru terkait	√		akan dilengkapi
6.	Catatan			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

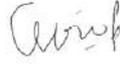
Yogyakarta, 28 Januari 2022

Pimpinan Sidang

Lusingsih, S.E., M.Si.  
NIP. 19721225 199703 2 002

MENYETUJUI

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NAMA	PERANGKAT DAERAH	TANDA TANGAN
Asih Indahati	Kemantren Ngampilan	
RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.	Kemantren Umbulharjo	
Ekowati Riadiningrum	Kemantren Tegalrejo	
Asih Indahati	Kemantren Ngampilan	
Meyrina Nur Ivada	Kemantren Gondokusuman	
Syarief Teguh Prabowo	Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	
Maya Puspita Sari	Kemantren Mantrijeron	
Sulistiyowati, SE	Kemantren Kraton	
Aji Nugroho	Kemantren Kotagede	
Antonius Suhardi	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	
Yuli Sri Wulandari, S.E.	Kemantren Wirobrajan	
PUTUT PURWANDONO	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA	
Yeti Kusumawati	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	
PARGIYAT,SIP	KEMANTREN MERGANGSAN	

NAMA	PERANGKAT DAERAH	TANDA TANGAN
GALUH INDAH RINANTI,SIP.MAP	KEMANTREN MERGANGSAN	
ASIH INAHATI	KEMANTREN GANDOMANAN	
narotama	kemantren danurejan	
Patricia Anggit Sri Harsono	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Erike Ocky DP	BPKAD	
Asri Widya Mulyaningrum, S.Sos	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	
ARIF RAHMAN	Dinas Perdagangan	
Asri Widya Mulyaningrum	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Muhammad Anhar, S.Sos.,M.AP	Dinas Pariwisata	
ARIF RAHMAN, SE	DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA	
Teguh Setiawan	Dinas Pariwisata	
Lestari Asih	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	
Ashardini E. Setianingsih, STP, MT	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	
SUGENG TRIYADI, S.Sos., M.Si.	Kemantren Pakualaman	
Nunuk Sudaryanti	Kemantren Gedongtengen	